

Menuju Orde Internasional Baru*

Jusuf Wanandi

Pengantar

TEILHARD de Chardin telah menunjukkan evolusi dunia dan manusia secara bertahap menuju ke suatu kesempurnaan. Menurut de Chardin, setiap tahapan memperlihatkan suatu perbaikan dan peningkatan dari tahap sebelumnya. Karena usia kemanusiaan baru meliputi beberapa puluh ribu tahun, jauh lebih muda jika dibandingkan dengan perkembangan dunia dan alam semesta, maka tahap-tahap perkembangan dan perjalanan kemanusiaan ke arah kesempurnaan diperkirakan masih cukup panjang. Dari perspektif demikian, apa yang dicanangkan oleh Francis Fukuyama sebagai berakhirnya sejarah dalam arti kemenangan *ide* liberalisme-kapitalisme-demokrasi atas sosialisme-komunisme-otokrasi, yang akan mengakhiri pertentangan

terakhir di dalam ide-ide mengenai negara dan kemasyarakatan, masih terlalu prematur.

Karena itu, berakhirnya Perang Dingin harus dikaji sebagai suatu tahap perkembangan peradaban manusia dan masyarakat menuju ke arah kesempurnaan. Tetapi, perkembangan ini belum berarti tercapainya atau mendekatinya kesempurnaan itu sendiri. Karena, akibat-akibat dan perkembangan zaman pasca-Perang Dingin masih belum menentu. Lagipula, sebab-sebab dan artinya yang tepat masih harus dikaji secara lebih mendalam. Pengkajian sepintas menunjukkan bahwa berakhirnya Perang Dingin telah dan akan membawa perubahan-perubahan fundamental dan sistemik dalam hubungan internasional, meskipun tidak selalu berarti menyeluruh dan tuntas, terutama bila dimaksudkan sebagai ide dan sistem kemasyarakatan, seperti yang akan diuraikan di bawah.

*Makalah ini disajikan dalam Seminar Sehari, Peringatan 20 Tahun: CSIS, "Menuju Satu Kebudayaan? Nasionalisme dan Internasionalisme di Persimpangan Jalan," yang diselenggarakan di Jakarta, 28 Agustus 1991.

Karena itu yang pertama-tama harus dipertajam adalah uraian tentang Perang Dingin itu, yaitu mengenai arti persisnya,

sebab-sebab dan akibat-akibat dalam hubungan internasional.

Perang Dingin merupakan konfrontasi antar dua blok yang menyeluruh sifatnya, dan meliputi segi-segi ideologi, sistem politik dan kemasyarakatan, sistem ekonomi, hubungan internasional dan militer-keamanan. Sebagai sistem ideologi, ide-ide yang terkandung di dalam Marxisme-Leninisme, yang berlandaskan historis-materialisme, dan yang menjadi landasan blok Timur, telah didiskreditkan, karena kegagalannya sebagai sistem pemikiran, sistem politik dan sistem ekonomi. Namun ada sebagian segi-seginya yang masih dapat dipergunakan seperti cara-cara pemikiran dialektik dalam membahas masalah-masalah kemasyarakatan dan ide keadilan sosial yang terkandung di dalam filsafatnya. Segi-segi ini masih relevan untuk masa depan, meskipun tidak lagi berlandaskan pada filsafat historis-materialisme atau melalui demokrasi sentralisme yang telah gagal sebagai cara-cara untuk mencapainya. Bahkan, sosialisme sebagai sistem ekonomi untuk mencapai keadilan sosial jelas-jelas telah mengalami kegagalan total.

Jelas bahwa sebab utama dari runtuhnya US sebagai negara adikuasa ialah karena kegagalan sistem ekonominya, sehingga negara itu tidak mampu mendukung ambisi dan kedudukannya sebagai negara adikuasa. Kedudukan itu mempunyai pengaruh tidak hanya di bidang militer saja, tetapi juga berarti kepemimpinan di bidang politik dan berpengaruh sebagai sistem ekonomi yang dapat mendukung kekuatan militernya, serta dapat memberikan dukungan kepada sekutu dan sahabat-sahabatnya. Faktor-faktor eksternal, termasuk tekanan AS di bawah Reagan dalam kompetisi persenjataan mutakhir yang mahal, turut mempengaruhi mundurnya US sebagai kekuatan adikuasa. Tetapi,

penyebab utama ialah kemerosotan ekonomi US yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dari rakyatnya sendiri.

Dengan demikian, apakah akan timbul ancaman jika politik luar negeri US kembali pada pola-pola konfrontasi dalam kebijaksanaan luar negerinya bila Gorbachev digantikan rezim baru yang konservatif? Kemungkinan ini memang kecil, karena kekuatan ekonominya yang diperlukan untuk mendukung kebijaksanaan yang konfrontatif itu tidak akan dapat dipulihkan dalam jangka waktu menengah. Di samping itu, yang menjadi tantangan pula bagi US di masa mendatang ialah bagaimana dapat *survive* sebagai suatu konfederasi baru di antara 9 dari 15 negara-negara yang ada (minus tiga negara-negara Baltik dan tiga negara Caucasus, yang pasti tidak dapat dipertahankan sebagai bagian dari US di masa mendatang). Dalam hal ini, perkembangan ekonominya akan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan *survival* tersebut.

Akibat dari berakhirnya Perang Dingin ini pertama-tama ialah terjadinya perubahan yang sistemik dalam hubungan internasional. Konfrontasi yang menyeluruh semenjak Perang Dunia II telah buyar dan karena itu suatu konfrontasi total antara dua sistem yang memiliki perbedaan mendasar dan menyefuruh serta bersenjata nuklir telah dapat diatasi. Dengan demikian, resiko perang total yang dapat menghancurkan umat manusia telah dapat ditekan sampai tingkat minimal. Meskipun masih merupakan suatu kekuatan militer yang besar dan bersenjata nuklir, karena perkembangan dalam negerinya Uni Soviet tidak lagi memiliki kemauan politik atau kekuatan ekonomi yang cukup untuk mendukung suatu konfrontasi militer yang besar. Memang bahaya tetap ada bila perkembangan dalam negerinya mengarah

kepada kediktatoran baru yang konservatif atau berantakan menjadi beberapa negara merdeka yang tidak ada kendalinya yang jelas dan bersenjata nuklir. Tetapi kemungkinan-kemungkinan tersebut tidak dapat dipertahankan untuk jangka yang cukup lama tanpa bantuan dan hubungan politik dan terutama ekonomi dengan negara-negara Barat.

Berakhirnya bahaya besar itu tidak berarti bahwa hubungan internasional telah menjadi suatu hubungan yang ditandai oleh perdamaian dan keadilan atau telah mencapai suatu hubungan tanpa konflik di masa mendatang. Yang paling dapat diharapkan di masa depan ialah Orde Baru Dunia akan membuka kesempatan dan sekaligus tantangan dalam mengatasi kekuatan-kekuatan dan bahaya-bahaya yang akan mengacaukan dunia. Berakhirnya Perang Dingin bukan berarti kita telah memasuki suatu "era perdamaian yang abadi". Karena, meskipun Perang Dingin telah selesai masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi hubungan internasional.

Tantangan yang harus dihadapi, antara lain bagaimana mengatur akibat-akibat berakhirnya Perang Dingin tersebut terhadap hubungan antara AS-US yang masing-masing akan mengalami suatu fase *inward looking*, karena masing-masing mengalami masalah dan tantangan dalam negeri yang cukup besar. Seperti yang telah disinggung di atas, perkembangan dalam negeri US mengalami kemerosotan yang paling parah. Seperti yang telah kita ketahui selama lebih dari 70 tahun terakhir ini, eksistensi US sebagai suatu federasi besar sedang mengalami krisis mendalam yang pada gilirannya akan menentukan nasib US. Dalam hal ini, nasib Uni Soviet di masa mendatang juga sangat ditentukan oleh berhasil atau tidaknya US

dalam mengatasi tantangan ekonomi dan politik, khususnya dalam mengatasi masalah hubungan antara pemerintah sentral dan negara-negara bagian. Di lain pihak, AS juga sedang mengalami tantangan-tantangan dalam negeri yang *critical* dalam perkembangannya di masa depan sebagai negara adikuasa.

Masalah yang dihadapi AS bukan hanya bagaimana mengatasi *twin deficits* dalam bidang ekonominya, tetapi yang lebih mendasar lagi adalah dalam menghadapi tantangan di bidang pendidikan, penelitian, masalah kesatuan bangsa, perbaikan infrastruktur fisik dan kesehatan penduduknya, serta perubahan-perubahan struktur di berbagai bidang ekonominya. Perkembangan-perkembangan ini melahirkan keterbatasan dalam kebijaksanaan luar negeri dan pertahanan AS di masa depan, yang tidak begitu saja dapat diandalkan untuk mengatasi masalah-masalah dan konflik internasional bila kepentingan nasionalnya tidak memiliki kaitan yang jelas bagi rakyatnya sendiri. Karena itu, perlu dipertanyakan apakah dunia yang "bipolar" telah menjadi "unipolar".

Argumen yang lebih tepat ialah bahwa dunia sungguh-sungguh telah menjadi "multipolar", kecuali dalam masalah-masalah militer yang dalam arti sempit untuk sementara masih tetap bersifat "bipolar". Artinya, meskipun AS akan tetap merupakan satu-satunya *superpower* yang sungguh-sungguh berpengaruh di bidang politik, ekonomi dan militer serta budaya sekalipun, tetapi dalam mencapai kestabilan, dan perdamaian dunia diperlukannya aliansi-aliansi yang dapat berubah-ubah untuk masalah-masalah yang berlainan. Dalam perkembangan demikian, PBB akan memegang peran yang lebih penting untuk mengatasi

atau mencegah konflik-konflik regional dan internasional di masa yang akan datang.

Konflik-konflik regional tidak akan berkurang, bahkan dapat bertambah jumlahnya, karena negara-negara besar tidak dapat lagi "mengatur" aktor-aktor regional tersebut seperti dahulu. Namun harus diakui bahwa konflik-konflik regional tidak mudah untuk berkembang menjadi konflik antara US dan AS seperti di zaman Perang Dingin. Semakin meluasnya globalisasi di bidang ekonomi dan bersatunya dunia karena pengaruh telekomunikasi yang canggih (proses integrasi), semakin tumbuh pula nasionalisme yang sempit dan berlebihan, ditambah dengan masalah-masalah etnis dan agama di dalam suatu negara atau antarnegara (proses fragmentasi).

Bahkan, berakhirnya Perang Dingin yang telah menahan proses fragmentasi tersebut selama lebih dari 45 tahun, telah membangkitkan kembali sentimen-sentimen primordial lama. Tetapi di lain pihak kerja sama dan pendekatan regional terhadap masalah-masalah/konflik-konflik regional pun makin menonjol, karena ternyata pendekatan internasional melalui PBB saja tidak akan memadai. Karena itu perlu dilengkapi dengan pendekatan regional. Bahkan sering terjadi pendekatan regional yang lebih dahulu mencari penyelesaian, baru kemudian dilengkapi dengan pendekatan DK-PBB, seperti dalam masalah Kamboja.

Menonjolnya masalah-masalah ekonomi dalam hubungan internasional tanpa adanya Perang Dingin telah menimbulkan masalah-masalah baru di dalam hubungan antara sekutu-sekutu lama, khususnya antara AS, Jepang, dan Jerman, dan antara negara-negara Barat, terutama EC, dengan Eropa Tengah dan US. Masalah-masalah hubung-

an negara industri dengan negara-negara berkembang menjadi akut kembali karena belum ada rumusan-rumusan baru untuk mengatasi masalah yang demikian eksplosifnya di masa mendatang. Komplikasi masalah bertambah karena di antara negara-negara berkembang terjadi pula divisi antara negara-negara yang dapat berkembang dengan pesat (Asian NIC's dan ASEAN) dan yang mandeg (Afrika).

Masalah-masalah baru di dalam hubungan internasional seperti lingkungan, imigrasi, perdagangan obat bius, terorisme dan penjualan senjata pembunuhan massal, perlu pula dijadikan masalah-masalah bersama karena potensinya yang dapat mengganggu perdamaian dan kestabilan internasional dan regional. Cara-cara mengatasi masalah-masalah ini belum jelas, sedangkan kerja sama internasional untuk mengatasi masalah-masalah baru ini masih sangat lemah dan baru pada tahap awal. Di samping itu masalah-masalah tersebut ada yang mewakili kaitan erat dengan masalah-masalah dalam negeri suatu negara, sehingga menimbulkan komplikasi karena sensitifnya masalah-masalah tersebut.

Pada akhirnya masalah-masalah dalam negeri seperti masalah-masalah hak asasi, sistem ekonomi dan politik yang dianut suatu negara, masalah ketidakstabilan nasional dan *rule of law*, dapat mempengaruhi kestabilan dan keamanan regional. Masalah-masalah ini telah menjadi persoalan karena adanya kecenderungan intervensi dari luar tanpa izin atau kehendak negara yang bersangkutan. Intervensi di Granada, Panama, dan Liberia tidak sempat menimbulkan masalah besar karena dampaknya yang terbatas dalam fora internasional. Tetapi, masalah Irak pasca-Perang Teluk telah menimbulkan pertanyaan mengenai tercipta atau tidaknya

suatu prosedur mengenai intervensi internasional tanpa diminta atau disetujui negara yang bersangkutan untuk masa depan.

Dari uraian di atas jelas bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, hubungan internasional telah memasuki suatu tahap baru. Pengalaman dari Perang Teluk telah melahirkan era yang memungkinkan kerja sama internasional, baik melalui PBB ataupun melalui kerja sama regional, untuk mencegah dan mengatasi konflik dan kekacauan secara lebih baik.

Dengan demikian, pandangan Teilhard de Chardin bahwa perkembangan dunia dan manusia selalu membawa kemajuan memang benar. Namun, perlu diingat bahwa semuanya itu masih dalam perkembangan yang panjang untuk masa-masa mendatang. Karena itu pula, hubungan internasional sebagai bagian dari hidup kemanusiaan masih jauh dari kesempurnaan, perdamaian dan keadilan.

Karangan ini untuk sebagian besar ditulis sebelum munculnya usaha kudeta terhadap kepemimpinan Gorbachev, sehingga nadanya agak optimistis untuk masa depan Orde Dunia Baru. Peristiwa penggulingan Gorbachev menunjukkan bahwa tetap ada kemungkinan kembalinya suatu fase yang tidak menentu dalam hubungan antara AS dan US, dengan segala akibatnya bagi kestabilan, keadilan dan perdamaian dunia.

Kalau melihat faktor-faktor dalam negerinya, yang penuh dengan tantangan di segala bidang, terutama di bidang ekonomi dan politik, dari awal sudah diragukan apakah rezim keras ini dapat bertahan, meskipun untuk jangka waktu yang pendek. Dengan adanya masalah-masalah dalam negeri yang begitu parah, dapat diperkirakan bahwa rezim keras ini akan lebih memusatkan per-

hatiannya kepada masalah-masalah dalam negeri itu. Hal itu tidak berarti mereka tidak dapat menjadi *spoiler* dalam usaha-usaha mencari orde baru dunia ataupun penyelesaian konflik-konflik regional seperti di Timur Tengah.

Tetapi yang jelas mereka tidak akan mampu mengembalikan kebijaksanaan luar negeri konfrontatif yang lama terhadap AS dan Barat, apalagi mengembalikan pemisahan Eropa yang telah diatasi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan Gorbachev selama enam tahun yang lalu. Hal ini disebabkan oleh masih dapat dipertanyakannya dukungan rakyat terhadap kebijaksanaan keras, demoralisasi militer US, dan tidak adanya kemampuan ekonomi untuk mendukung tindakan dan kebijaksanaan ekstrem tersebut. Terhadap kawasan Asia Pasifik, belum terlihat perubahan-perubahan yang mendalam di bidang militer seperti di kawasan Eropa. Sementara, partisipasi politik dan ekonomi US di kawasan ini baru saja dimulai dan masih sangat terbatas. Karena itu, pengaruh langsung peristiwa kudeta atas Gorbachev untuk kawasan ini bisa dikatakan kecil. Tetapi, dampak dari perkembangan internasional terutama dalam hubungan antara US dan AS di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dapat mempengaruhi suasana kawasan Asia Pasifik yang sedang menuju pada dialog politik keamanan dan kerja sama ekonomi secara riil dan positif.

Implikasi penggulingan Gorbachev memang ada, tetapi tidak untuk waktu yang lama dan mendasar karena perkembangan dalam negeri US sendiri, di mana hubungan ekonomi dengan pihak Barat merupakan hal yang vital. Perubahan-perubahan selama enam tahun ini, terutama sejak Perjanjian 23 April 1991 antara Pusat dan sembilan Republik lainnya serta Pemilu tanggal 12

Juni 1991 di Rusia, telah menunjukkan arah perubahan mendasar dari komunisme kepada demokrasi dan ekonomi pasar yang tidak dapat dibendung lagi. Tetapi, *Putsch* yang dicoba tanggal 19 Agustus 1991 itu telah mengalami kegagalan dan diharapkan US di bawah Gorbachev dan Rusia di bawah Yeltsin dapat memacu suatu program yang lebih progresif dan berani ke arah demokrasi dan *free market* seperti yang diidamkan oleh seluruh rakyat Rusia.

Perkembangan Baru di Dunia Internasional

Perkembangan AS dan US Pasca-Perang Dingin dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Internasional

Perkembangan AS

Masalah pokok yang dihadapi AS ialah bagaimana menjadikan kepemimpinan yang telah ditunjukkannya dalam mengakhiri Perang Dingin, dan kemudian selama Perang Teluk, sebagai contoh bagi kepemimpinannya di masa yang akan datang.

Dengan perkataan lain, apakah dengan runtuhnya US sebagai suatu kekuatan adikuasa maka dunia dan hubungan internasional menjadi "unipolar" dengan AS sebagai kekuatan adikuasa yang tunggal dengan segala kemungkinan eksekutifnya terhadap hubungan internasional yang damai dan adil? Kalau dilihat dari sudut perkembangan di dalam negerinya, dapat diperkirakan bahwa AS akan "dipaksa" memberi perhatian yang serius pada masalah-masalah domestik. AS sedang menghadapi berbagai persoalan mendasar dan dalam periode perubahan yang mendalam dan karenanya me-

merlukan perhatian dari kepemimpinan nasionalnya. Masalah-masalah itu bukan hanya masalah ekonomi saja, dalam arti berkurangnya *saving* dan investasi, penelitian dan pendidikan, perbaikan *inner cities* dan infrastruktur ataupun produktivitas di bidang industri dan *manufacturing*, tetapi juga masalah sosial dan politik yang lebih mendalam.

Kalau sampai sekarang belum ada perhatian terhadap masalah-masalah demikian, hal itu disebabkan oleh permainan politik dalam negeri yang dangkal tanpa pandangan jauh ke depan, sehingga masalah-masalah pokok seperti pendidikan dan penyertaan kelompok minoritas demi produktivitas nasional tidak tercapai. Begitu pula masalah intra generasional antara generasi muda dan tua mengenai beban ekonomi yang harus ditanggung di masa depan melalui *social security*, serta tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab untuk memperbaiki masa depan, sehingga masalah-masalah strategis ini belum terselesaikan.

Lagipula, hingga kini belum terjadi krisis-krisis nasional yang dapat mengguncangkan opini rakyatnya. Sebab lain ialah karena kepemimpinan politik di AS sekarang ini sedang mengalami suatu kemacetan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang saling bertentangan di antara para pemimpin politik mengenai masalah perbaikan ekonomi. Karena itu, tidak ada yang berani menanggung risiko dengan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu tetapi dapat menyebabkan kekalahan dalam pemilu karena kebijaksanaan yang tidak populer.

Jadi, yang menyebabkan keterbatasan AS untuk ikut serta dalam memimpin perkembangan internasional di masa men-

datang bukanlah *imperial overstretched* tetapi karena secara politis AS tidak mau dan tidak mampu mengatasi masalah-masalah dalam negerinya yang demikian kritis. Dengan berakhirnya Perang Dingin yang telah menjadi *rationale* para pemimpin AS mengenai peran AS sejak Perang Dunia II, sulit untuk meyakinkan rakyat AS yang sedang mengalami masalah-masalah dalam negeri yang besar dan memerlukan biaya yang besar pula, untuk menjadikan kembali AS sebagai "pengatur" atau polisi" dunia. Di samping itu, sulit bagi AS untuk meneruskan peran kepemimpinannya di dunia tanpa lawan yang jelas, yang dapat merongrong pertahanan negara dan wilayahnya, dan tanpa ada desakan untuk menyebarkan ide-ide liberalisme di dunia. Lagipula, peran sebagai polisi dunia internasional tidak cocok dengan kepribadian rakyat AS.

Karena itu dapat diperkirakan bahwa peran AS dalam hubungan internasional di masa mendatang akan berkurang. Untuk sementara, para aktivis dalam hubungan internasional seperti Presiden Bush memang masih mendapat angin dengan berakhirnya Perang Teluk yang telah memberikan perasaan bangga kepada rakyatnya. Tetapi, dengan hilangnya alasan pokok bagi peran aktif AS, bersamaan dengan beratnya masalah-masalah dalam negeri, rakyat AS akan memilih sasaran-sasaran dan peran yang lebih realistis dan sederhana dalam Orde Baru Dunia yang akan datang. Hal itu tidak berarti bahwa AS akan mundur dari hubungan internasional seperti yang pernah terjadi sesudah Perang Dunia I sampai menjelang Prang Dunia II. Keterlibatan dan ketergantungan AS dengan dunia luar, terutama di bidang ekonomi, cukup besar. Misalnya 13% dari GNP AS diekspor ke luar negeri (20% dari barang-barang industri,

30% dari hasil pertanian); berjuta-juta buruh di AS tergantung pada ekspor tersebut; produksi cabang-cabang perusahaan AS di luar negeri menjadi bagian integral dari keberhasilan perusahaan-perusahaan AS, yang keuntungannya tergantung dari hubungan luar negeri. Di samping itu, impor energi dan bahan-bahan mentah merupakan hal yang vital bagi AS. Akhirnya, dapat dikatakan AS sangat tergantung pada stabilitas politik dan akses terhadap ekonomi mitra dagangnya. Semuanya itu cukup penting secara ekonomi dan strategis bagi AS.

Yang masih perlu dipertanyakan ialah, apakah kemerosotan sistem perdagangan dan ekonomi internasional yang sekarang sedang mengalami krisis akan dipandang oleh rakyat AS sebagai pengganti US dan komunisme sebagai ancaman yang baru? Masalah-masalah ekonomi tersebut memang mengandung pertentangan, tetapi juga kerja sama dan masalah hubungan ekonomi tidak menyeluruh dan sekonkret ancaman US di masa lalu. Persoalan ekonomi pasti akan menimbulkan masalah baru, tetapi tidak dapat menggantikan ancaman US di zaman Perang Dingin.

Seperti yang telah disebut di atas, fase sekarang ini adalah fase transisi di AS, di mana pengertian-pengertian lama masih dipakai untuk menilai fase baru yang belum pernah ada presedennya di dalam sejarah. US ambruk bukan karena kekalahan perang tetapi karena keruntuhan sistem ekonominya dari dalam yang kemudian mempengaruhi sistem-sistem lainnya di bidang politik, sosial dan ideologi. Tetapi, pengaruh ide-ide dan pengalaman lama tidak mudah dilepaskan begitu saja, terutama bila ide-ide dan pengalaman tersebut membawa kemenangan bagi AS. Dengan tidak adanya kepastian di masa depan, dirasa ada gunanya untuk tidak

begitu saja mengubah kebijaksanaan yang lama, meskipun telah terjadi perubahan-perubahan dalam situasi sekarang ini.

Agar kebijaksanaan-kebijaksanaan lama, yaitu partisipasi AS dan kepemimpinannya dalam menyusun orde internasional baru, dapat diterima rakyat AS, maka pengurangan ongkos-ongkosnya dalam bentuk pengorbanan keuangan dan manusia menjadi penting. Karena itu, suatu keseimbangan baru antara sasaran-sasaran yang terbatas dan pengurangan beban dalam mencapai sasaran-sasaran itu menjadi penting artinya bagi diterimanya peran AS di masa mendatang oleh rakyatnya. Dengan demikian, AS akan lebih memainkan perannya dalam hubungan internasional bersamasama dengan peran negara-negara lain dalam rangka berbagi beban, seperti yang telah ditunjukkannya dalam Perang Teluk.

Perkembangan US

Di atas telah diuraikan bahwa runtuhnya US sebagai negara adikuasa berarti bahwa perannya dalam ikut merumuskan orde internasional baru akan terbatas. Namun, hal itu tidak berarti bahwa US tidak berperan sama sekali. Karena kekuatan militernya masih cukup besar, meskipun landasan ekonomi dan politiknya semakin berkurang. Dalam fase transisi, keikutsertaan US masih diperlukan untuk memudahkan mencari penyelesaian internasional atas masalah-masalah dunia dan regional, seperti terlihat dalam Perang Teluk. Masalah-masalah pokok yang dihadapi US demikian kritis dan vital, sehingga penyelesaiannya akan menentukan bertahan tidaknya sebuah US yang telah dikenal sejak 70 tahun yang lalu.

Di bidang ekonomi, masalah yang diha-

dapi US ialah bagaimana mengubah sistem ekonomi terpusat dan diatur oleh birokrasi dengan suatu sistem campuran antara ekonomi terencana (dengan sektor publiknya) dan ekonomi pasar. Sistem campuran ini merupakan fase transisi menuju sistem pasar dan dijalankan terutama oleh pelaku-pelaku swasta. Ada yang berpendapat bahwa US harus mengarah kepada ekonomi pasar secara cepat, drastis, dan konsekuen dengan menghilangkan subsidi secara bertahap dan dalam waktu yang tidak lama, mengakui hak milik, serta menjual perusahaan-perusahaan negara pada rakyat dan swasta. Sedangkan akibat-akibatnya terhadap tingkat inflasi dan produksi dapat diatasi dengan bantuan luar negeri (model Polandia).

Di samping itu, ada yang berpendapat agar perubahan dilakukan secara bertahap dan pada akhirnya akan menuju suatu sistem ekonomi campuran antara sistem terencana dan pasar dengan peran pemerintah dan swasta yang berdampingan. Pertarungan antara jalan yang drastis dan pintas atau evolusioner dan bertahap ini belum selesai di US. Di samping itu, KTT 7 negara-negara industri Barat mengaitkan persoalan itu dengan pentingnya perombakan-perombakan politik yang diperlukan bagi keberhasilan perubahan di bidang ekonomi. Karena kedua masalah itu belum selesai, negara-negara industri pada KTT London masih bersikap mendua mengenai bantuan besar-besaran untuk US.

Di bidang politik, ada dua masalah besar yang saling berkaitan yang dihadapi US: *Pertama*, masalah penerimaan kepemimpinan partai komunis oleh rakyat US, terutama oleh para pendukung-pendukung demokrasi. *Kedua*, masalah pengaturan hubungan antara pusat dan daerah di masa mendatang. Dalam perkembangan demokrasi di US, ke-

pelopor partai komunis sedang digerogeti oleh para "demokrat" dengan berbagai cara, sedangkan Gorbachev masih mencoba mengubah partai dan komunisme untuk menjadi lebih manusiawi. Akhirnya, pada Pemilu Rusia 12 Juni 1991 yang lalu terjadi perubahan drastis seperti yang terjadi di Eropa Timur pada tahun 1989, ketika Gerakan Solidaritas menang dalam Pemilu di Polandia dan terpaksa dijadikan pemimpin pemerintahan Polandia berdampingan dengan Partai Komunis di bawah Jaruelski.

Dalam Pemilu Rusia 12 Juni 1991, Boris Yeltsin, Gavril Popov (Walikota Moskow) dan Anatoly Sobchak (Walikota Leningrad) berhasil menang dengan jumlah suara sekitar 60-65%. Pemilu itu merupakan pertarungan antara "Komunis" dan "Demokrat", di mana para demokrat secara terbuka ingin menghapuskan struktur-struktur totaliter demi *rule of law*, "milik pribadi" dan "pasar".

Dalam masalah hubungan pemerintahan pusat dan daerah/negara-negara bagian, telah dicapai perjanjian antara pusat dengan sembilan negara bagian pada tanggal 23 April 1991, atau dikenal dengan nama perjanjian "9 + 1", yang merupakan suatu kemenangan bagi kelompok negara-negara bagian yang dipimpin Yeltsin. Meskipun perjanjian ini merupakan hasil kompromi karena Gorbachev mendapat dua konsesi yaitu dicanangkan "disiplin kerja" dan larangan akan pemogokan, sembilan negara bagian mendapat hasil yang jauh lebih banyak. Perjanjian itu secara implisit mengakui hak negara-negara Baltic dan Caucasus untuk memisahkan diri; peralihan kekuasaan administratif dan ekonomi yang penting dari pemerintahan pusat kepada republik-republik; dan janji akan dibentuk konstitusi baru dan suatu Pemilu yang sungguh-sungguh de-

mokratis di seluruh US pada tahun 1992. Dalam protokol Perjanjian 23 April 1991 yang tidak diumumkan tersebut, Yeltsin memenangkan pula dua hal: televisi yang independen untuk republiknya dan KGB yang dalam beberapa hal terpisah dari pusat. Karena itu, *Agreement* atau *Round Table* tanggal 23 April tersebut dapat ditafsirkan sebagai proses peralihan kekuasaan sejati yang pertama kali terjadi di US. Meskipun, untuk merampungkan proses peralihan tersebut harus dilanjutkan dengan proses peralihan di bidang-bidang yang lain.

Dengan kesepakatan tersebut sebagai landasan, dapat dikatakan Pemilu Rusia tanggal 12 Juni itu telah memberikan hasil yang fundamental bagi Rusia, yaitu dengan adanya pemerintahan nonkomunis pertama yang masih harus berbagi kuasa dengan rezim partai komunis yang masih berfungsi seperti di Polandia dua tahun yang lalu (1989). Di masa mendatang, salah satu di antara mereka harus mengalah seperti halnya di Polandia ataupun di Rusia pada tahun 1917. Para demokrat di bawah Yeltsin mencoba memenangkan pertarungan tersebut dengan menghapuskan sel-sel Partai dari berbagai badan-badan ekonomi dan mengharuskan para ketua dari "Soviet-Soviet" (badan-badan perwakilan) di seluruh Rusia untuk ikut mempertaruhkan kedudukannya dalam Pemilu. Dengan demikian, perombakan politik yang dianggap sebagai syarat mutlak itu, harus mendahului perombakan ekonomi. Pada tahap berikutnya, adalah rakyat yang selanjutnya terpaksa harus menderita akibat perombakan ekonomi seperti yang dialami Polandia.

Karena masalah-masalah dalam negeri yang demikian parahnya, dapat diperkirakan bahwa US akan menjadi *inward looking* dan tidak akan mampu mendukung suatu

kebijaksanaan luar negeri yang ekspansif seperti terjadi pada tahun 1970-an sampai pertengahan 1980-an, ketika Gorbachev menghentikannya dan mengubahnya dengan kebijaksanaan baru. Kalaupun sekarang ini AS masih mengajak US untuk mengatur hubungan internasional yang baru, semuanya itu demi mengatasi fase transisi, terutama karena memang kekuatan militer US masih besar dengan persenjataan nuklir. Namun, di masa yang akan datang US akan lebih memusatkan perhatian pada fase pembenahan dalam negeri baik dari segi ekonomi maupun politik, sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbuat banyak dalam bidang luar negeri.

Karena itu, demi pembangunan ekonomi dan kestabilan politiknya, arah kebijaksanaan US terhadap Eropa Tengah tidak akan berubah. Kebijaksanaannya terhadap Jepang akan berubah melalui jalan kompromi tentang *Northern Territories*. US juga akan mengurangi persenjataan di Pasifik, dan bersama-sama AS dan PBB akan mencoba untuk ikut mencari penyelesaian konflik-konflik regional seperti di Timur Tengah, Jazirah Korea, Kamboja, dan lain-lain.

Jadi, kalaupun sekarang kelihatannya ada *duopoly* antara US-AS dalam berbagai masalah dunia dan regional, semuanya itu harus diterima karena fase transisi ini. Selama itu peran US masih bermanfaat untuk mencari penyelesaian masalah-masalah regional dan mondial tersebut. Namun, terasa bahwa yang sebenarnya partner yang aktif adalah AS. Kalau kerja sama ini lebih tampak dalam masalah-masalah keamanan, dalam kerja sama ekonomi internasional peran US hampir tidak dirasakan. Masih perlu diamati bagaimana hubungan ini akan berkembang di masa yang akan datang, karena

arah perkembangan US masih belum jelas, apakah akan benar-benar demokratis, lebih totaliter atau justru akan bersifat anarkis. Tetapi jelas bahwa masalah-masalah dalam negerinya akan meminta perhatian serius, sehingga peran AS dalam merumuskan Orde Dunia Baru akan kurang menonjol.

Masalah-masalah Regional, Lembaga-lembaga Regional dan Usaha Pembentukan Orde Baru Dunia

Di atas telah dijelaskan bahwa meskipun Perang Dingin telah selesai dan ketegangan serta konfrontasi antara kedua kekuatan adikuasa yang dapat membawa perang dunia telah berakir, hal itu tidak berarti terselesaikannya konflik-konflik regional. Karena, konflik-konflik tersebut memiliki alasan-alasan tersendiri, bukan disebabkan oleh Perang Dingin.

Karena itu dapat diperkirakan bahwa konflik-konflik semacam itu akan terus berlanjut. Masalah Timur Tengah, Cyprus, Kamboja, Kashmir dan Jazirah Korea merupakan contoh-contoh yang jelas. Bahkan benua Eropa pun tidak terlepas dari konflik-konflik etnis, regional dan religius yang sudah lama ada. Hanya saja, Perang Dingin berhasil meredam konflik-konflik itu sehingga tidak muncul ke permukaan. Contoh yang paling jelas sekarang ini ialah Yugoslavia, sedangkan negara-negara lain di Eropa Tengah merasa tekanan-tekanan bersejarah ini, seperti antara Cheko dan Slovakia, atau antara Hongaria dan Rumania, Jerman dan Polandia dengan minoritas-minoritasnya tersendiri. Bahkan US akan lebih merasakan tekanan-tekanan tersebut di masa yang akan datang, bukan hanya dari republik-republik Baltic atau Caucasus saja, tetapi juga dari bagian Soviet Tengah yang

beragama Islam.

Usaha menciptakan orde internasional baru mendapat dorongan yang kuat dari perkembangan pasca-Perang Teluk. Dengan selesainya Perang Dingin, untuk pertama kalinya terdapat satu situasi konflik yang "murni" dalam arti: agresi jelas dan langsung, suatu kawasan yang vital karena minyak, kerja sama sampai tingkat tertentu antara kedua negara adikuasa, suatu kesempatan menempa orde internasional yang baru di mana landasannya adalah keadaan sekuriti bersama (*collective security*) setelah Perang Dingin selesai.

Namun tidak dapat diharapkan bahwa konflik-konflik regional lainnya akan sama vitalnya dengan Perang Teluk, sehingga menyebabkan AS akan bekerja sama dengan US dan anggota-anggota tetap DK-PBB atau dengan anggota-anggota lainnya. Karena itu dirasakan bahwa di samping PBB harus diperkuat terus sebagai badan dunia untuk mencegah maupun mengatasi konflik, harus ada pula kerja sama regional, yang lebih sensitif dan lebih aktif memperhatikan kewasannya karena kerja sama demikian lebih berkepentingan langsung dalam menjaga kestabilan, perdamaian dan kemakmuran. Di atas alasan pokok ini ditambahkan pula kenyataan bahwa badan-badan PBB belum sempat diubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan pasca-Perang Dingin, meskipun dalam Perang Teluk PBB dapat menunjukkan kemajuan yang sangat berarti bagi tugas-tugas dan wewenangnya di masa depan.

Berbicara mengenai masalah-masalah regional dan badan-badan regional, maka yang pertama-tama harus dikemukakan ialah perkembangan di kawasan Eropa. Karena kawasan itulah yang menjadi pertarungan utama antara blok Barat dan Timur selama Perang Dingin, dan kawasan itu pulalah

yang berkembang paling maju dalam mengatasi pemisahan yang terjadi selama 45 tahun setelah Perang Dingin selesai. Eropa juga menunjukkan kemajuan yang berarti dalam pembentukan lembaga-lembaga regional, meskipun prosesnya belum selesai.

Dengan ditandatanganinya CFE (*Treaty of Conventional Armed Forces in Europe*) dan *Charter of Paris for a New Europe* yang mengandung *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE) di Paris pada tanggal 19 November 1990, sekaligus US telah menutup kemungkinan untuk kembali "menguasai" bekas negara-negara Pakta Warsawa ataupun memisahkan Eropa kembali. *Treaty Paris* tersebut telah membentuk pula badan kerja sama dan keamanan bersama Eropa yang terdiri dari 34 negara (dengan kemungkinan Albania akan ikut serta dalam waktu dekat). Pada awalnya badan ini akan berfungsi sebagai wadah dialog mengenai keamanan di Eropa, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi badan yang akan mengatur politik dan keamanan Eropa, bila ada persetujuan bersama, sesuai dengan ide *European Confederation* dari Presiden Mitterand.

Namun, CSCE belum memiliki mekanisme yang lengkap untuk mengatur keamanan Eropa seperti terlihat dalam keterbatasannya mengatur "perang saudara" di Yugoslavia. Karena itu, NATO, melalui *Trans-Atlantic Declaration* di Paris yang diadakan oleh AS dan EC, perlu dipertahankan terus dan masih relevan. EC juga memerlukan suatu "tonggak Eropa" untuk mengatur masalah-masalah khusus keamanan Eropa seperti masalah Yugoslavia. Untuk sementara ini, kekurangan tersebut dicoba diisi oleh WEU (*Western European Union*) meskipun belum berhasil. Dalam hal ini WEU dianggap sebagai tangan militernya EC, te-

tapi belum dapat diterima oleh seluruh EC (seperti terlihat dari anggotanya, yaitu baru sembilan dari 12 anggota EC).

Di samping masalah keamanan yang cukup rumit yang meliputi masalah struktur keamanan yang baru untuk seluruh Eropa (termasuk negara-negara Eropa Tengah dan US); hubungan dengan AS; masalah *irredentist* etnis dan religius di Eropa Tengah dan di Balkan, perkembangan ekonomi di kawasan ini memerlukan perhatian juga. Pada akhirnya, yang menjadi persoalan ialah penyertaan negara-negara Eropa Tengah dan akhirnya US ke dalam ekonomi Eropa Barat (EC) dan negara-negara Barat pada umumnya (termasuk AS, Kanada dan Jepang). Karena hal itu akan menjamin mampu tidaknya negara-negara tersebut menjaga kelangsungan hidupnya dengan baik di masa depan. Hal ini sangat erat hubungannya dengan masalah yang dihadapi EC, yaitu apakah harus mendahulukan *pendalaman* di antara 12 negara anggota sekarang dengan kerja sama di bidang finansial moneter, sampai pula pada bidang politik-keamanan (pandangan Brussels yang didukung Perancis dan Italia), atau mendahulukan *perluasan*, dalam arti menerima pula anggota-anggota baru secara bertahap dengan menunda pelaksanaan kerja sama finansial moneter dan politik keamanan (pandangan Inggris).

Jelas bahwa Perang Teluk dan runtuhnya kesatuan di Yugoslavia melahirkan masalah baru yang riil dan mendesak bagi EC, karena jelas bahwa EC belum dapat berperan sebagai kesatuan politik dalam menghadapi kedua peristiwa tersebut. Padahal, di masa depan EC perlu menunjukkan adanya kepemimpinan dan kesatuan pendapat, apalagi dalam masalah Yugoslavia yang dianggap sebagai masalah khusus Eropa di mana

EC harus dapat memimpin penyelesaiannya. CSCE sebagai badan yang semestinya mengatur keamanan seluruh Eropa, seperti yang telah diduga sebelumnya terhambat oleh prinsip konsensus dalam pengambilan keputusan, karena US menolak campur tangan CSCE dengan alasan masalah Yugo tersebut adalah masalah dalam negeri yang terletak di luar wewenang CSCE. Sikap ini menunjukkan bahwa US tidak menghendaki suatu preseden yang kelak dapat dipaksakan dalam masalah yang menyangkut antara pemerintah pusat dan republik-republiknya.

Hal lain yang masih menjadi masalah di kawasan Eropa ialah peran Jerman di masa mendatang baik di bidang ekonomi dan politik keamanan. Dari perkembangan penyatuan Jerman, dan karena pengalamannya di masa lalu, jelas bahwa Jerman tidak ingin berjalan sendiri di Eropa. Sejak Perang Dunia II, Jerman (Barat dan Timur) telah dimasukkan ke dalam suatu kerangka regional agar dapat diawasi. Sekarang ini, dengan selesainya Perang Dingin dan reunifikasi, Jerman mempunyai kebebasan kembali untuk menentukan perannya di Eropa kelak.

Dari proses penyatuan maupun dari keenggannya untuk ikut dengan kekuatan militer dalam Perang Teluk jelas bahwa Jerman tidak akan mencari jalan sendiri dalam bidang politik keamanan, tetapi lebih memilih berjalan bersama-sama dengan negara-negara Eropa lainnya dalam CSCE, EC (dan WEU) serta dalam NATO. Di masa mendatang, Jerman akan lebih merasa beruntung untuk berperan melalui kekuatan ekonominya, bukan melalui jalan militer. Yang penting ialah apa yang akan dilakukan Jerman dengan kebebasan untuk menentukan nasibnya, yang sampai sekarang masih bersama-sama dengan negara-negara Eropa lainnya, terutama dengan EC, dan AS.

Kevakuman kepemimpinan politik di Eropa ini, khususnya dalam mengatasi perkembangan di US yang belum menentu di masa depan maupun agar partisipasi Jerman dalam kerja sama regional kawasan Eropa tetap dipertahankan, menjadikan peran AS di Eropa masih tetap penting. Sekarang, peran itu dijalankan melalui NATO. Di masa yang akan datang, mungkin melalui CSCE atau akan dibentuk badan baru yang menjamin hubungan trans-Atlantik dengan AS.

Setelah "euforia" tahun 1989 dengan jatuhnya tembok Berlin, kawasan Eropa jauh lebih realistis dalam menghadapi masalah-masalah yang besar dan sulit, seperti menyusun struktur keamanan yang baru; menyerap negara-negara Eropa Tengah yang menghadapi krisis ekonomi dan politik yang cukup parah; menghadapi perkembangan US; memperdalam atau memperluas EC; dan menentukan peran EC di luar Eropa, termasuk dalam soal Teluk Parsi dan Timur Tengah serta Afrika. Tetapi hambatan utama, pemilahan Eropa dalam dua bagian yang disebabkan Perang Dingin, telah berhasil disingkirkan. Lembaga-lembaga yang diperlukan telah ada meskipun belum sempurna seperti CSCE, EC (dan WE) serta NATO. Yang akan diperlukan di masa mendatang ialah kepemimpinan kenegaraan seperti yang ditunjukkan dalam berbagai krisis yang dialami Eropa sejak Perang Dunia II.

Kawasan Timur Tengah

Kawasan ini menghadapi berbagai masalah yang bersifat primordial seperti masalah Israel-Palestina; hubungan antara negara Arab yang radikal melawan yang konservatif; yang kaya melawan yang miskin; yang

Sunni melawan yang Syiah; masalah Arab melawan non-Arab. Faktor-faktor eksternal juga ikut menambah kompleksnya situasi, yaitu ide bahwa negara-negara Barat pada akhirnya merupakan kekuatan nekolim. Selain itu masih banyak masalah lain, misalnya masalah Utara-Selatan, masalah Islam melawan non-Islam, masalah minyak dan penguasaannya, dan masalah alih senjata canggih. Sementara itu pertarungan Timur-Barat, yang dulu sempat menimbulkan kekacauan keamanan, kini telah berkurang. Tetapi, tanpa adanya penyelesaian masalah-masalah primordial, keseimbangan, keamanan dan perdamaian di kawasan ini akan sulit dicapai.

Karena itu, dengan berakhirnya Perang Teluk, baru sebagian kecil yang terselesaikan yaitu mengembalikan kedaulatan Kuwait dari agresi Irak, sedangkan masalah-masalah lain masih banyak yang menghambat kestabilan dan keamanan di sana. Masalah kesatuan Irak dan penentuan rezim mana yang akan mempertahankan keutuhan dan kedudukannya sampai sekarang belum dapat diselesaikan. Bantuan yang diberikan pada bangsa Kurdi dan pemeluk Syiah Irak yang berarti intervensi dalam politik dalam negeri lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, dapat merupakan preseden yang sulit disebut sebagai bahaya karena kemungkinan justru akan menguntungkan bagi penyelesaian konflik-konflik regional atau nasional di masa yang akan datang.

Masalah Palestina-Israel adalah masalah yang paling sulit diselesaikan di Timur Tengah karena sejarah dan kompleksitas masalahnya. Usaha-usaha Bush dan Baker telah memajukan pendekatan-pendekatan ke arah penyelesaian, dan momentum yang ditimbulkan oleh situasi dan perkembangan pasca-Perang Teluk telah membantu ke arah

penyelesaian. Tetapi posisi Israel begitu bertolak belakang dengan pihak yang lain dalam menerima prinsip *land for peace* yang menjadi dasar usul-usul penyelesaian sengketa, sehingga sulit untuk dapat optimistis mengenai penyelesaian di sana. Masalah prosedural banyak mengalami kemajuan dengan adanya kemungkinan perundingan langsung antara pihak-pihak bersengketa yang akan dimulai dengan konferensi internasional. Adanya kesepakatan antara negara-negara adikuasa untuk mencari penyelesaian juga merupakan kemajuan besar.

Di samping masalah Palestina-Israel, berakhirnya Perang Teluk baru dapat dianggap betul-betul berhasil bila dapat memulai suatu pendekatan realistik dalam menyelesaikan masalah-masalah jangka panjang di sana, yaitu:

- adanya struktur keamanan baru untuk kawasan Timur Tengah, yang terutama mengandalkan kekuatan regional, yaitu kerja sama antara Mesir, Syria, dan Saudi;
- pencegahan dan pelarangan penjualan senjata ABC dan yang canggih lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan secara besar-besaran. Langkah awal sudah dilakukan antara Bush, Mitterand dan Major, tetapi langkah-langkah yang lebih konkret, adil dan menyeluruh masih ditunggu;
- usaha-usaha untuk mengatasi jurang yang lebar antara negara-negara kaya dan miskin di kawasan dalam bentuk kerja sama ekonomi regional, bank pembangunan regional dan bantuan pembangunan antar pemerintah (ODA);
- usaha-usaha pada akhirnya untuk ikut membantu perkembangan evolusioner negara-negara Arab ke arah peningkatan partisipasi rakyat dan keterbukaan sistem politiknya sesuai dengan nilai-nilai budaya dan sejarah masing-masing.

Penyelesaian Perang Teluk telah mendorong dimulainya usaha-usaha ke arah penyelesaian masalah-masalah jangka panjang di Timur Tengah. Apakah kesempatan tersebut dipergunakan sebaik-baiknya atau tidak terutama sekali akan tergantung pada kekuatan-kekuatan lokal dan regional di kawasan, di samping dorongan dari bantuan AS yang merupakan satu-satunya kekuatan adikuasa yang mempunyai wibawa untuk itu.

Kawasan Asia Pasifik

Kawasan Asia Pasifik secara relatif telah dapat menjaga kestabilan serta memiliki dorongan yang kuat untuk maju terus secara bersama-sama, seperti yang dapat dilihat dari tiga fenomena di bawah ini:

- dialog-dialog bilateral antara negara-negara yang bertentangan seperti, normalisasi atau pendekatan RI-RRC, US-Jepang, RRC-Vietnam, Taiwan-RRC, US-Korea Selatan, RRC-Korea Selatan, Korea Selatan-Utara, dan Muangthai-Vietnam. Kesemuanya ini disebabkan oleh suasana kerja sama dan hubungan baik yang dialami dunia internasional sejak berakhirnya Perang Dingin. Dengan perkembangan ekonomi yang begitu pesat di Pasifik Asia, dirasakan pula keperluan akan dialog dan kerja sama politik untuk mendukung perkembangan ekonomi yang dinamis dan saling menguntungkan itu;
- konflik-konflik regional seperti Kamboja, Jazirah Korea, *Northern Territories*, Kepulauan Spratly's dan Paracel, dan masalah Taiwan-RRC sedang diusahakan jalan penyelesaiannya, terutama oleh kekuatan-kekuatan regional dan didukung oleh negara-negara besar, melalui PBB dan non-PBB. Dalam usaha penyelesaian ini me-

mang belum ada yang dapat diselesaikan dengan tuntas, dan usaha-usahanya pun masih berbeda-beda bobotnya, tetapi perkembangan ke arah itu cukup menggembirakan dan minimal tidak akan menimbulkan ketidakstabilan besar dalam waktu menengah di kawasan Asia Pasifik;

perkembangan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, terutama integrasi bidang *manufacturing*, demikian dramatisnya selama enam tahun yang lalu sehingga desakan kerja sama ini dirasakan pula pengaruhnya ke bidang-bidang politik keamanan secara positif. Sudah barang tentu hubungan ekonomi tersebut mengandung friksi, sehingga dirasakan perlu kerja sama regional. Untuk itu telah dibentuk PECC dan APEC untuk mengatasi friksi-friksi yang ada dan untuk memajukan kerja sama regional tersebut secara menyeluruh. Desakan untuk kerja sama bidang politik keamanan itu dimaksudkan untuk menjamin agar kerja sama dan interdependensi ekonomi tersebut lebih mantap, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang aman, damai dan adil yang diperlukan bagi kelangsungan upaya itu.

Karena alasan-alasan di atas, dialog politik keamanan menjadi penting bagi kawasan Asia Pasifik. Dialog tersebut akan membicarakan masalah-masalah politik keamanan di kawasan untuk menciptakan *Confidence Building Measures* (CBM), mengatasi sengketa-sengketa regional yang minimal agar tidak menjadi konflik terbuka. Di samping itu, kerja sama dapat ditingkatkan di berbagai bidang dan pada akhirnya bila saling percaya sudah diciptakan, maka dapat pula dipikirkan forum untuk membahas masalah *arms control* di kawasan Asia Pasifik.

Memang kawasan Asia Pasifik berbeda dengan kawasan Eropa, karena kawasan ini

lebih kompleks dan aktornya lebih beragam. Di antaranya ada yang memiliki perbedaan kebijaksanaan dengan negara adikuasa karena *non-aligned* seperti Cina, sedangkan strategi kekuatan adikuasa pun tidak simetris (AS berstrategi maritim, sedangkan US kontinental). Model Eropa dan CSCE tidak dapat dicontoh secara keseluruhan. Tetapi elemen yang mendasar dapat dijadikan bahan perbandingan dan pelajaran. Karena kawasan Asia Pasifik hingga kini tidak mengenal lembaga dialog yang diperlukan itu, untuk dapat mencapai sasaran dalam waktu dekat ini, ASEAN-PMC (*Post Ministerial Conference*) yang sudah meliputi 12 negara Asia Pasifik dan berkali-kali telah membicarakan masalah-masalah politik keamanan terutama Kamboja, seyogyanya dapat dijadikan lembaga dialog politik keamanan. Pada tahun pertama dapat saja ASEAN-PMC merumuskan dulu persyaratannya dan agendanya, dan setelah itu US, RRC, Vietnam, serta Korea Utara juga perlu diundang pada pertemuan tambahan yang sengaja disiapkan untuk itu oleh ASEAN-PMC. Dengan demikian, pada akhirnya bisa diletakkan suatu orde regional untuk seluruh kawasan Asia Pasifik, yang akan menjadi bagian dari orde internasional baru, yang akan mendukung, memperkuat dan melengkapinya secara regional.

Masalah-masalah Ekonomi Internasional dan Regional, Kini dan di Masa Depan

Akhir-akhir ini masalah-masalah ekonomi menjadi jauh lebih penting peranannya dalam hubungan internasional daripada sebelumnya, meskipun masalah-masalah geostrategis masih tetap penting seperti ditunjukkan dengan berakhirnya Perang Dingin dan perkembangan US serta Perang Teluk.

Ada yang menamakan masalah-masalah baru di bidang ekonomi tersebut masalah-masalah geoeconomis (Ed Lutwak). Masalah pertama dari masalah-masalah baru itu yang sekarang sudah menjadi persoalan penting dalam sistem ekonomi internasional adalah hubungan antar negara-negara industri dengan segala friksi dan ketidakcocokannya. Salah satu hal yang menonjol dalam bidang ini ialah perkembangan ekonomi Jepang yang begitu pesat sehingga menimbulkan masalah besar. Ada yang mengatakan bahwa Jepang akan berubah dan dengan demikian akan menjadi masyarakat konsumen pula, sehingga tidak perlu dikhawatirkan untuk jangka panjang. Para revisionis di AS beranggapan bahwa Jepang adalah masyarakat yang berbeda dengan negara-negara Barat, karena tidak memperdulikan konsumsi rakyatnya tetapi berusaha menguasai ekonomi dunia dengan cara-cara merkantilis dan dengan menitikberatkan dirinya sebagai masyarakat produsen. Karena itu, Jepang harus dihadapi dengan cara yang berbeda.

Masalah kedua ialah bagaimana mengatur hubungan dengan negara-negara berkembang. Di sini ada pula dua persoalan: *pertama*, bagaimana mengatur hubungan dengan negara-negara berkembang secara umum, apakah secara regional seperti PECC dan APEC atau dengan cara-cara lain yang lebih efektif untuk memasukkan ekonomi-ekonomi mereka ke dalam sistem internasional seperti GATT, World Bank, dan IMF. Masalah *kedua*, ialah bagaimana negara-negara Asian NIC yang sangat agresif dalam perdagangan dapat dimasukkan ke dalam sistem yang lebih teratur agar tidak menggoncangkan sistem perdagangan dunia.

Hal-hal yang masih agak panjang akibat-akibatnya ialah penyatuan ekonomi Eropa

Barat yang mungkin baru dirasakan secara menyeluruh pada awal abad ke-21. Tetapi sekarang sudah ada kecenderungan bahwa negara-negara yang tergabung dalam kesatuan ekonomi itu akan mengutamakan hubungan ekonomi antar mereka sendiri.

Penyerapan ekonomi-ekonomi Eropa Tengah (dan mungkin US) ke dalam sistem internasional, juga merupakan masalah baru. Jelas pula bahwa perhatian Eropa Barat secara normal ditujukan pada ekonomi-ekonomi mereka, sehingga mengalihkan perhatian EC terhadap hubungannya dengan negara-negara berkembang.

Masalah lainnya di bidang ekonomi internasional ialah bagaimana menyesuaikan badan-badan ekonomi internasional tersebut seperti IMF, World Bank, GATT, dengan perkembangan-perkembangan baru di atas. Jelas *Uruguay Round* mencoba mengatur kembali rezim perdagangan internasional dengan memasukkan perdagangan pertanian dan jasa ke dalamnya, tetapi belum jelas apakah akan berhasil dalam tahun ini. Karena itu, timbul bahaya lahirnya blok-blok perdagangan regional seperti EC, NAFTA dan EAEG, atau suatu pemisahan antara negara-negara industri yang dikuasai AS, Jerman, dan Jepang dengan negara-negara berkembang lainnya yang tidak banyak mempunyai wewenang dalam menentukan nasibnya. Di samping itu, dengan penambahan-penambahan kapital saja, apakah peran IMF dan World Bank sudah cukup untuk membantu ekonomi dunia di masa yang akan datang?

Masalah baru lainnya, berkembangnya ekonomi dunia, terutama di bidang moneter-finansial, produksi-industri dan perdagangan ke arah transnasional tanpa dapat dikuasai oleh satu atau beberapa negara. Perkembangan di bidang moneter-finansial begitu

cepat dan kuat keterikatannya sehingga susah dikontrol oleh para pemerintahan. Dengan demikian ekonomi dunia di luar penguasaan dan kedaulatan negara dan pemerintahan cukup besar. Semuanya ini belum memiliki tata tertib, kontrol dan badan internasional yang mengaturnya secara penuh.

Jadi, meskipun ekonomi menjadi faktor yang makin penting dalam hubungan internasional, namun pengatur dan badan-badan yang menangani jauh tertinggal di belakang. Kalau sebelumnya hegemoni AS dapat menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diikuti pihak lain, kini kedudukan AS relatif menjadi *primus inter pares* sedangkan aturan permainan dengan mitra dan dengan negara-negara lain belum ada.

Karena itu masalah geoeconomis harus menjadi perhatian di masa yang akan datang karena dapat menjadi sebab baru dari pertikaian dan konflik. Namun, perlu diakui bahwa akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bidang tersebut tidaklah keras dan mendadak sebagaimana bidang geostrategis, karena hubungan ekonomi tidak merupakan *zero sum game*.

Masalah-masalah Baru dalam Hubungan Internasional

Masalah lingkungan, migrasi, terorisme, penjualan dan peredaran obat bius, penjualan senjata destruktif massal merupakan masalah-masalah baru dalam hubungan internasional serta belum jelas pengaturannya. Masalah-masalah ini penting untuk ditangani bersama oleh masyarakat internasional karena dampaknya kepada hubungan internasional yang semakin nyata.

Masalah lingkungan merupakan masalah yang kompleks dan meliputi berbagai

macam hal yang belum jelas cara penanganannya. Meskipun PBB telah mulai memberi perhatian dan pada tahun 1992 akan mengadakan pertemuan besar, tetapi masih banyak segi-segi masalah yang belum mendapat penelitian secara mendalam. Di samping itu, belum ada kesamaan pandangan antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang mengenai cara penanganan masalah ini. Bagi negara-negara berkembang masalah pembangunan ekonomi dan *basic human needs* masih vital. Dalam hal ini, berbagai usaha negara industri untuk memperhitungkan pula masalah-masalah lingkungan dalam pembangunan ekonomi dirasakan sebagai hambatan. Sementara itu, negara-negara industri tidak secara sungguh-sungguh memberikan alternatif lain kepada mereka untuk hidup dan berkembang.

Masalah migrasi juga akan merupakan masalah yang pelik dan besar di masa mendatang. Terhambatnya pembangunan di negara-negara berkembang, yang antara lain karena tidak diperhatikan atau dibantu oleh negara-negara industri, akan menimbulkan migrasi besar-besaran ke negara-negara industri. Arus migrasi ini, misalnya dari Afrika, terutama Magribi, ke Eropa Timur dan US, atau dari Asia Selatan ke Eropa, dan dari Amerika Latin ke AS. Alasan-alasan konflik nasional dan regional juga dapat mendorong arus pengungsi ke negara-negara yang lebih aman, misalnya dari Sri Lanka atau Vietnam ke negara-negara industri. Karena itu, bantuan ekonomi kepada negara-negara berkembang ataupun bantuan untuk mengatasi dan mencegah konflik-konflik tersebut akan meringankan beban migrasi yang dapat mendestabilisasikan negara-negara industri seperti Eropa dan AS. Karena, arus pengungsi ini diduga akan cukup besar di masa-masa mendatang. Badan-badan PBB yang akan memperhatikan

masalah-masalah lingkungan dan migrasi harus diberi wibawa, wewenang dan bantuan keuangan yang lebih untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut di masa mendatang.

Terorisme adalah gejala keputusan dalam perkembangan politik dan adakalanya dijadikan alat politik dalam hubungan internasional. Meskipun kerja sama internasional sudah dimulai, namun sampai sekarang upaya-upaya yang ada masih belum memadai, dan harus ditingkatkan secara sungguh-sungguh. Terhentinya bantuan-bantuan politik, mengendalikan krisis keuangan, latihan dan persenjataan yang dulu didapat dari negara-negara komunis tertentu, memberi peluang yang lebih besar untuk menggagalkan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah terorisme ini.

Perang Teluk memperlihatkan betapa pentingnya masalah penjualan senjata canggih berkapasitas pemusnah massa dalam konteks mencegah dan mengatasi konflik-konflik regional di masa yang akan datang.

Meskipun sudah terlihat kesungguhan negara-negara besar anggota permanen DK-PBB untuk mengatasi masalah ini, tetapi belum cukup jelas dan tegas dalam hal yang seharusnya dilakukan. Karena itu, diperlukan opini internasional untuk menonjolkan hal-hal yang dapat merumitkan konflik-konflik regional sehingga menghambat usaha-usaha penanggulangannya.

Masalah-masalah dan Perkembangan-perkembangan Dalam Negeri yang Berdampak pada Hubungan Internasional

Salah satu tonggak hubungan internasional di zaman modern, selama 200 tahun

ini ialah persoalan kedaulatan negara. Prinsip ini pula yang menjadi landasan PBB, sehingga yang menjadi anggota adalah negara, sedangkan peran PBB dalam hal-hal domestik hanya diperkenankan bila ada permintaan atau izin dari pemerintahan yang bersangkutan.

Prinsip ini sekarang telah dipersoalkan dengan kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat Perang Teluk, yaitu dalam soal keamanan minoritas Kurdi di Irak dari ancaman pasukan-pasukan militer Saddam Hussein, di mana negara-negara besar dan DK PBB telah melakukan intervensi tanpa dan malahan bertentangan dengan keinginan pemerintahan Irak. Apakah tindakan ini akan menjadi preseden atau tidak di masa yang akan datang perlu mendapat kejelasan guna menghadapi situasi yang sama nanti.

Tendensi akan tercampurnya hubungan antara negara dengan hubungan dengan kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi dalam negara sehingga ini menjadi lebih jelas. Begitu pula dalam masalah-masalah hak-hak asasi. Sesuai dengan perkembangan di negara-negara Barat, ide untuk menjadikan masalah hak asasi sebagai bagian dari perangkat penting hubungan luar negeri di mana tuntutan-tuntutan pelanggarannya harus diikuti oleh negara-negara lain telah menimbulkan pula preseden-preseden baru yang membuat hubungan internasional lebih kompleks di masa-masa mendatang. Hal itu tidak berarti bahwa prinsip intervensi ke dalam politik dalam negeri negara-negara lain tanpa izin pemerintahan yang bersangkutan telah diterima oleh semua negara. Karena, hingga kini hal ini masih merupakan kecenderungan dari negara-negara Barat. Contoh terakhir ialah dalam soal sanksi terhadap Cina akibat peristiwa Tienanmen, atau prinsip dikaitkannya bantuan luar negeri (ODA)

dengan pelaksanaan hak-hak asasi di negara penerima seperti yang ingin diberlakukan oleh negara-negara EC terhadap negara-negara ASEAN dalam dialog di Brussels bulan Juni 1991 yang lalu, yang kemudian ditolak oleh ASEAN.

Masalah lain sehubungan dengan perhatian terhadap hak-hak negara yang bertentangan dengan pelaksanaan hak-hak individual dan golongan-golongan ialah soal intervensi dalam perkembangan politik dalam negeri negara-negara lain dengan maksud menunjang perkembangan ke arah demokrasi dan menolak perkembangan ke arah diktator. Misalnya, apa yang terjadi dengan Filipina di tahun 1986, negara-negara di Eropa Tengah tahun 1989-1990 dan dalam hal *putsch* di US pada akhir Agustus yang lalu. Apakah tindakan-tindakan negara-negara Barat tersebut dapat dinamakan "intervensi ke dalam perkembangan domestik negara lain" atau tidak, masih dapat diperdebatkan. Tetapi yang jelas ialah bahwa negara-negara lain ikut mendorong atau menolak perkembangan dalam negeri suatu negara dengan sanksi-sanksi yang beragam. Pengaturan tentang sanksi-sanksi atau intervensi tersebut belum ada kejelasan hukumnya, kecuali dalam *Treaty of Paris* tentang CSCE tahun 1990. Dalam peristiwa-peristiwa lain dasar hukumnya hanya berupa konvensi-konvensi PBB tentang hak-hak asasi dan pelanggaran-pelanggarannya, yang baru berupa prinsip-prinsip dan belum menjadi hukum positif internasional. Namun harus diakui bahwa prinsip hubungan antar negara untuk masa depan harus dilengkapi dengan hubungan antara negara dengan individu atau golongan negara lain dan hubungan antara golongan atau individu dan golongan dan individu negara-negara lain. Yang menjadi masalah adalah bagaimana meletakkan dasar-dasar

baru bagi hubungan yang sudah mulai memasuki hubungan internasional tanpa adanya ketegasan tentang landasan, cara-cara dan pelaksanaan yang dapat diterima bersama.

Jelas bahwa hak-hak asasi sudah menjadi milik dunia. Namun masih ada perbedaan mengenai titik berat hak-hak di bidang soshal atau sosial ekonomi, dan mengenai cara-cara pelaksanaannya yang harus pula mempertimbangkan perbedaan-perbedaan sejarah, nilai-nilai dan budaya antar negara-negara. Karena itu kejelasan mengenai prinsip, bidang-bidang yang diliputi dari kehidupan manusia dan cara-cara pendekatan yang dapat diterima dunia internasional dan regional penting untuk dirumuskan secara bersama-sama di masa yang akan datang.

Di dalam hal ini PBB dapat mengambil inisiatif untuk meletakkan prinsip-prinsipnya yang lebih komprehensif dan dilengkapi dengan usaha-usaha dan lembaga-lembaga regional yang dapat merumuskan cara-cara pelaksanaannya secara lebih tepat dan sesuai dengan nilai-nilai suatu kawasan. Di samping itu, usaha-usaha bilateral dan terutama nasional untuk mencapai pelaksanaan hak-hak asasi merupakan hal yang penting pula. Dalam soal upaya bilateral, persetujuan-persetujuan internasional mengenai cara-cara pelaksanaannya tetap harus dituruti agar lebih efektif. Pada akhirnya, usaha-usaha nasional yang akan menentukan perkembangan hak-hak asasi maupun demokrasi suatu negara dan masyarakat. Hendaknya kenyataan ini dapat diakui dan menjadi pegangan yang penting dalam mengatur hubungan internasional baru di masa mendatang, di mana hubungan negara dengan golongan dan individu negara lain akan diakui pula.

PBB, Kerja Sama Regional dan Perannya dalam Orde Baru Dunia

Dengan berakhirnya Perang Dingin jelas bahwa PBB akan memegang peran yang penting dalam menempa hubungan internasional yang baru di masa depan, yang dimungkinkan oleh terciptanya hubungan baik dan kerja sama US-AS. Sebelumnya, Perang Dingin yang mengakibatkan hubungan konfrontatif antara kedua *superpower* tidak memberi kesempatan bagi PBB untuk bergerak di bidang keamanan.

Perkembangan ini terlihat jelas dalam perkembangan Perang Teluk, di mana kerja sama antara AS-US dan anggota-anggota DK-PBB lainnya memungkinkan adanya tindakan *collective security* terhadap agresi Irak atas Kuwait. Kejadian tersebut merupakan tindakan keamanan kolektif yang kedua yang pernah diambil oleh PBB setelah yang pertama kali dalam Perang Korea.

Dukungan PBB ternyata sangat penting untuk meyakinkan opini negara-negara Dunia Ketiga dan juga Kongres AS untuk mendukung tindakan-tindakan, termasuk tindakan militer koalisi, terhadap Irak. Pada umumnya, PBB bermanfaat dalam usaha-usaha *peace-keeping* yang lebih bersifat mencegah suatu konflik untuk tidak menjadi konflik militer dan tugas-tugas politik lainnya seperti dalam hal kemerdekaan Namibia tahun 1989. Tugas-tugas yang berdasarkan landasan *collective security* seperti dalam konflik Irak-Kuwait tidak mudah dipraktekkan ke dalam situasi konflik lain di masa mendatang. Sifat-sifat konflik Teluk dianggap vital oleh AS dan negara-negara Barat karena faktor minyak, agresinya yang jelas, kepentingan Israel, dan penting dalam rangka proses menyusun Orde Baru Dunia.

Di samping itu, prinsip-prinsip *collective security* sendiri masih perlu dikembangkan dan dilengkapi. Misalnya, karena PBB tidak mempunyai perangkat-perangkat dan komando militernya sendiri, seringkali PBB harus mengandalkan negara-negara lain yang belum tentu mempunyai kepentingan nasional untuk melakukannya. Demi kepentingan Orde Internasional Baru maka perangkat-perangkat, keuangan dan kemampuan serta wewenang PBB perlu disempurnakan dalam menjalankan tugas *peace-keeping* maupun tindakan-tindakan militer berdasarkan asas *collective security* dari Piagam PBB. Hal ini perlu dilakukan karena di masa yang akan datang negara-negara adikuasa lebih *inward-looking* dan pelaksanaan *multi-polarity* kekuasaan di dunia memerlukan lembaga internasional yang dapat berfungsi sebagai perangkat pengatur hubungan di antara mereka dan antara negara-negara besar dengan negara-negara lain di dunia.

Di samping penyempurnaan perangkat di bidang keamanan di atas, perlu dilakukan pengaturan kembali organisasi PBB, agar dapat menggambarkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di dunia dan dalam hubungan internasional.

Hal lain yang perlu diatur ialah peraturan-peraturan agar suatu negara dapat melakukan intervensi ke dalam negara lain untuk melindungi kelompok-kelompok atau individu-individu negara tersebut. Misalnya, dalam situasi Irak pasca-Perang Teluk, pelanggaran hak-hak asasi yang terlalu menyolok, dan bila perkembangan dalam negeri suatu negara dapat menyebabkan ketidakstabilan yang parah atau perang saudara yang akan berdampak pada lingkungannya.

Karena masih terbatasnya peranan PBB, meskipun sudah ditingkatkan dalam era

pasca-Perang Dingin, dan lebih-lebih lagi selama dan setelah Perang Teluk, maka perlu pula dikembangkan dan dilengkapi badan-badan regional untuk mendukungnya secara regional. Sebelumnya, telah diuraikan tentang peran CSCE di Eropa, meskipun peran dan perangkatnya belum lengkap. Tetapi, bila US dapat ikut serta dalam ekonomi dan keamanan seluruh Eropa, maka CSCE mempunyai harapan untuk mewujudkan ide Mitterand di masa mendatang dalam menciptakan suatu "Konfederasi Eropa", di mana AS juga akan merupakan bagian integral dan aktif. Sementara itu, peran EC (dengan WEU) dan NATO tetap penting sampai terwujudnya suatu struktur keamanan yang efektif dan dapat diterima semua pihak.

Di kawasan Asia Pasifik, badan kerja sama ekonomi telah ada dalam bentuk PECC dan APEC. Dialog politik keamanan sedang dirintis dan diharapkan dapat dimulai dari ASEAN PMC tahun depan. Sasaran akhirnya ialah untuk menentukan suatu orde regional yang dapat mengatur hubungan *multi-polarity* antara negara-negara besar dan dengan negara-negara lain di kawasan. Dengan demikian, diharapkan stabilitas perdamaian dan keadilan serta perkembangan dan dinamika ekonomi di kawasan dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.

Penutup

Dari uraian di atas, jelas bahwa telah banyak yang dicapai dalam hubungan internasional dalam menuju suatu Orde Baru Dunia. Namun, masih banyak hal yang perlu diperjuangkan dan dirumuskan dalam menciptakan suatu orde yang lengkap dan utuh. Tetapi jelas bahwa dalam sejarah hubungan

internasional sejak Perang Dunia II yang ditandai oleh Perang Dingin, telah banyak dicapai kemajuan-kemajuan fundamental dan sistemik yang akibat-akibat sepenuhnya belum dapat dijangkau oleh kita.

Berakhirnya Perang Dingin secara dramatis telah mengurangi kemungkinan terjadinya pertentangan antara dua sistem masyarakat yang bisa menimbulkan Perang Dunia dengan kehancuran dunia. Namun, konflik regional tetap akan ada karena faktor-faktor penyebab yang memang asli regional ataupun lokal. Faktor-faktor ekonomi makin menonjol dalam hubungan internasional tetapi kita belum bisa mengaturnya dengan baik sehingga seluruh dunia akan ikut menikmatinya pula. Lembaga-lembaga yang mengaturnya sudah tidak memadai lagi, sedangkan hal-hal baru yang timbul di bidang hubungan ekonomi semakin banyak dan kompleks. Untuk itu, diperlukan ide-ide baru dan keamanan politik yang kuat.

Hubungan antar negara akan dilengkapi dengan hubungan-hubungan lain, yaitu hubungan dengan individu dan kelompok-kelompok/golongan-golongan dalam negara, yang berarti intervensi ke dalam urusan negara lain, baik dalam situasi konflik, soal minoritas, pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan perkembangan yang sehat dari masyarakat dan negara lain ke arah *rule of law* dan demokrasi. Masalah ini belum mendapat konsensus yang bulat, tetapi semakin mendesak untuk diatur bersama dalam hubungan internasional. Semakin eratnya hubungan internasional seperti yang terjadi sekarang karena perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi, semakin banyak pula nilai-nilai yang dianggap internasional dan menjadi milik bersama. Karena itu diperlukan konsensus mengenai hal-hal yang

dianggap sebagai nilai-nilai hakiki yang dipunyai kemanusiaan dan bagaimana cara pelaksanaannya.

Masalah-masalah baru seperti lingkungan, migrasi, terorisme, *drug-trafficking*, penjualan senjata canggih ke negara-negara berkembang, merupakan masalah-masalah yang belum terjawab secara memuaskan, padahal cukup penting artinya bagi perdamaian dan keadilan.

Semuanya ini menunjukkan perlu diperkuatnya peran PBB sebagai satu-satunya perangkat internasional. Usaha-usaha untuk memperbaiki perangkat-perangkat, wewenang, pengetahuan, keuangan dan personalia PBB harus didukung sepenuhnya.

Di samping itu, kerja sama dan badan-badan regional, yang diperlukan untuk melengkapi perangkat internasional itu dan memberikan sumbangan regional bagi penyelesaian masalah-masalah baru dalam hubungan internasional itu, perlu pula mendapat partisipasi RI yang aktif, seperti PECC, APEC sampai pada ASEAN. Di Asia Pasifik, perlu diatur suatu perangkat kerja sama baru di bidang politik keamanan. Untuk hal ini, ASEAN-PMC diharapkan dapat menjadi landasannya. Badan itu penting artinya bagi dialog dan usaha menciptakan kestabilan dan kemajuan di kawasan. Juga perlu diadakan forum kerja sama antara ASEAN dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya demi kemajuan dan perdamaian kawasan berdasarkan *Treaty of Amity and Cooperation ASEAN* tahun 1976.

Akhirnya perlu diperhatikan bahwa hubungan internasional baru membutuhkan sikap keterbukaan kita terhadap masalah-masalah internasional dan regional dan partisipasi rakyat yang lebih besar, karena interdependensi antar negara, masyarakat, kelompok-kelompok/golongan-golongan masyarakat dan individu sudah demikian tingginya. Hal ini berarti, di satu pihak kedaulatan negara/nasional harus diimbangi dengan kepentingan-kepentingan internasional dan regional dan sifatnya semakin relatif. Di lain pihak hubungan internasional tidak lagi berarti hubungan antar negara saja tetapi juga meliputi hubungan dengan kelompok-kelompok/golongan-golongan dan individu-individu dalam negara dan masyarakat. Hal ini menjadikan perbedaan antara masalah-masalah nasional dan internasional tidak setegas dulu lagi.

Orde Baru Dunia sedang dalam taraf perkembangan dan pembentukan. Perhatian dan partisipasi kita semuanya sangat dibutuhkan, karena akhirnya kita semuanya akan dipengaruhi secara lebih langsung dan intensif dibanding zaman-zaman sebelumnya.

Dalam perkembangan sejarah manusia langkah-langkah yang telah diletakkan demi kemajuan hubungan internasional baru merupakan langkah-langkah yang penting dalam mendorong perjalanan umat manusia dalam menyempurnakan nasib dan budayanya.